



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW PROVINSI JAMBI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WARSONO
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 411162

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.530.000.000**

1. Tanah Seluas 194 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA ,
HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 335 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA
YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000.000
3. Tanah Seluas 432 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA ,
HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/75 m2 di KAB / KOTA
KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **1.084.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 325.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
340.000.000
3. MOTOR, VESPA LX125 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
34.000.000
4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
385.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **289.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **8.250.050.000**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp.

Rp.

16.153.550.000

III. HUTANG

Rp.

2.129.283.903

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

14.024.266.097

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.